

## **BUKU HABIBIE DAN YANG LAINNYA** **Wahyudi Kumorotomo**

Seolah-olah kebetulan, belakangan ini banyak debat diantara para tokoh politik mengenai sejarah. Di tengah peringatan hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, banyak orang yang mempertanyakan kebenaran fakta tentang G30S-PKI yang selama puluhan tahun didominasi oleh wacana pemerintah Orde Baru. Setelah berganti generasi, masyarakat tampaknya belum cukup puas tentang pengungkapan sejarah yang tertulis di dalam banyak buku. Lalu, kini masih ramai kontroversi tentang kesaksian sejarah mantan presiden Habibie tentang peralihan kekuasaan dari Suharto dalam buku yang berjudul *Detik-detik yang Menentukan*. Apakah para tokoh politik sedang berusaha mendapatkan kebenaran sejarah dan melakukan dekonstruksi atas penulisan sejarah yang tidak benar? Ataukah sebaliknya, sedang terdapat upaya untuk membuat sejarah baru? Inilah yang sulit dicari jawabannya.

Dalam sejarah politik di Indonesia, peralihan kekuasaan dari presiden Sukarno ke presiden Suharto yang diawali dengan G30S-PKI pada tahun 1965 adalah yang paling banyak memakan korban jiwa. Estimasi dari *The New York Times* ketika itu memperkirakan bahwa lebih dari 500.000 orang terbunuh dalam upaya pembersihan anasir PKI. Sudah banyak buku ditulis mengenai peristiwa sejarah ini. Sebagian dari buku pada masa Orba mengindikasikan bahwa penyebab dari semua peristiwa tragis itu adalah PKI (Notosusanto, 1968). Ada yang menguraikan secara detil peristiwa itu sebagai bagian dari konflik ideologi antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan di mana militer ikut berperan (Hughes, 1967; Anderson, 1971; Crouch, 1978). Tetapi ada pula yang secara implisit justru menyebut peristiwa itu sebagai kudeta sistematis oleh pemimpin Orde Baru (Latief, 1999).

Seiring dengan semakin jauhnya rentang waktu dari peristiwa ini, dan tetap gelapnya fakta yang menunjukkan tentang siapa pelakunya, sebagian orang mungkin bahkan berusaha untuk melupakannya. Cukup untuk diingat peristiwa itu sebagai noda hitam dalam sejarah bangsa. Luka kolektif itu tampaknya hendak disembuhkan dengan dirumuskannya UU No.27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tetapi tampaknya upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tetap merupakan persoalan yang rumit. Presiden belum menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota KKR peristiwa 1965 yang direncanakan terdapat 21 orang itu. Begitu pula, belum jelas benar tujuan dari upaya rekonsiliasi itu, dan apakah wakil dari semua pihak bisa benar-benar memaafkan dan melakukan rekonsiliasi.

Peristiwa peralihan kekuasaan pada bulan Mei 1998 ternyata juga menimbulkan kontroversi. Korban nyawa secara langsung mungkin tidak banyak dibanding peristiwa tahun 1965. Tetapi fakta tentang korban dari peristiwa Semanggi dan kerusuhan 12-15 Mei sebenarnya juga masih diselimuti labut dan tidak banyak pelaku utama yang kemudian diadili untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Berkenaan dengan kekerasan menjelang peralihan kekuasaan tersebut, mungkin sebagian elit politik lebih memilih untuk melupakannya. Rekomendasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) telah dibuat, namun tindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan itu tetap belum jelas.

Pengungkapan sejarah menjadi persoalan ketika para pelakunya sendiri masih hidup dan mungkin punya agenda kepentingan tersendiri. Oleh Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad ketika itu, buku *Detik-detik yang Menentukan* yang ditulis Habibie dianggap menyudutkan dirinya dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Habibie menulis bahwa ketika itu terdapat kemungkinan adanya kudeta oleh satuan militer yang dipimpin oleh Prabowo. Sebaliknya, Prabowo berpendapat bahwa pasukan yang dibawanya adalah untuk melindungi istana negara dan tidak ada maksud untuk melakukan kudeta. Setelah publik membaca adu argumentasi sengit di media massa, kabarnya Prabowo

akan menulis buku versinya sendiri mengenai peristiwa setelah tanggal 21 Mei 1998 itu. Mengenai peristiwa peralihan itu sendiri, masyarakat juga bisa membaca buku yang ditulis sebelumnya oleh Wiranto yang berjudul *Bersaksi di Tengah Badai*. Dalam wawancara dengan pers terkait persetujuan Habibie-Prabowo, Wiranto tampaknya berusaha untuk tidak memihak seraya mengatakan bahwa tidak ada tradisi kudeta di TNI. Tidak seperti di Thailand yang terjadi baru-baru ini.

Namun kisah mengenai peralihan kekuasaan pada tahun 1998 itu sebenarnya sudah tertulis dalam beberapa buku, dan mungkin akan lebih banyak lagi buku yang ditulis oleh para pelaku maupun para pengamat. Selain tulisan Wiranto, buku yang ditulis Amien Rais berjudul *Memimpin Dengan Nurani* adalah salah satu yang ditulis oleh pelaku atau elit politik yang terlibat. Karya Edward Aspinall berjudul *The Last Days of President Suharto*, karya Richard Mann berjudul *Plots and Schemes that Brought Down Suharto*, dan karya Kevin O'Rourke berjudul *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Suharto Indonesia*, adalah contoh buku yang ditulis oleh pengamat. Sebagian dari buku itu mungkin akan mengungkapkan fakta-fakta baru. Sebagian yang lain mungkin hanya menimbulkan kontroversi diantara para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Lantas bagaimana masyarakat harus menyikapi buku-buku yang menyajikan fakta yang berbeda-beda itu? Berkenaan dengan sumber-sumber historis mengenai peristiwa G30S-PKI tahun 1965 yang menelan ribuan nyawa, buku apa pun tampaknya tidak akan mengubah kenyataan bahwa sejarah peralihan kekuasaan di Indonesia memiliki noda hitam. Sejarah hitam itu perlu diingat. Tidak untuk dilupakan tetapi untuk bercermin sehingga di masa mendatang peristiwa kelam itu tidak terulang lagi. Andaikata semua orang bisa menerima kebenaran, memaafkan dan melakukan rekonsiliasi, dendam mungkin tidak akan ada lagi.

Barangkali kita perlu melihat pengalaman negara Afrika Selatan yang layak dicontoh dalam melakukan rekonsiliasi. Negara ini pernah mengalami konflik rasial bertahun-tahun yang mengakibatkan ribuan korban jiwa. Pada tahun 1994, setelah negara itu terbebas dari penindasan pemerintahan apartheid, pemerintah yang dipimpin Nelson Mandela segera menyerukan dilakukannya rekonsiliasi. Semua korban dan pelaku kekerasan, baik dari kalangan kulit hitam maupun kulit putih harus mengaku dan menceritakan di depan publik mengenai apa yang telah terjadi. Penyelesaian tidak dilakukan semata-mata dengan perangkat hukum karena sebagian dari pelaku mungkin adalah korban, bertindak sebagai eksekutor karena paksaan. Lalu setelah semua kebenaran terungkap, dimulailah rekonsiliasi yang sebenarnya. Semua saling memaafkan, berjanji untuk tidak mendendam, dan berbuat yang terbaik untuk semua pihak. Penggambaran yang getir dan sekaligus mengharukan itu tampak dalam sebuah film berjudul *In My Country* yang menceritakan proses rekonsiliasi di Afrika Selatan.

Terkait dengan peristiwa 1965 di Indonesia, sayang sekali bahwa para pemimpin bangsa tidak segera menemukan rumusan yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan rekonsiliasi. Namun, sekalipun terlambat, komitmen dari pemerintah dengan pembentukan KKR kiranya perlu ditindaklanjuti dengan tindakan riil untuk menuju rekonsiliasi yang bersifat final. Dokumen, sumber pustaka, dan buku-buku yang pernah ditulis tentang peristiwa itu dapat dijadikan sebagai sumber rujukan meskipun harus selalu diklarifikasi kebenarannya.

Terkait dengan peristiwa 1998, masalahnya lebih rumit karena fakta yang telah ditulis mungkin melibatkan pelaku yang sampai sekarang masih hidup dan boleh jadi berniat untuk tampil kembali di panggung politik nasional. Namun berkenaan dengan penulisan kisah sejarah, ada dua hal penting yang dapat dipegang. Pertama, penulisan sejarah tidak mungkin seratus persen objektif jika yang menulis adalah pelakunya sendiri. Tulisan dari pengamat atau sejarawan pun bisa memunculkan interpretasi subjektif, apalagi yang ditulis oleh pelakunya. Seperti halnya otobiografi, buku sejarah

yang ditulis oleh pelaku harus dipahami sebagai upaya penulisnya untuk menggambarkan situasi yang dihadapinya pada suatu peristiwa sehingga unsur subjektifnya pasti sangat kuat.

Kedua, dalam kerangka demokratisasi, penulisan buku kesaksian hendaknya dipandang sebagai upaya mewujudkan kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, setiap orang berhak menulis kesaksian tentang sejarah, tetapi masyarakat hendaknya jangan terlarut untuk mengikuti uraian dalam buku kesaksian sejarah itu sebagai kebenaran mutlak. Barangkali perlu direnungkan kembali apa yang pernah ditulis oleh Karl Popper (1972), seorang filsuf yang memperdebatkan objektivitas sejarah: "...gagasan tentang kebenaran bersifat mutlak (*absolutis*), tetapi tidak ada seorangpun yang sesungguhnya berhak mengklaim kepastian yang mutlak; kita semua adalah pencari kebenaran, tetapi bukan pemilik kebenaran itu sendiri" (*We are seekers for the truth but not its possessors*). Selamat membaca dan menikmati buku-buku tentang sejarah reformasi.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah staff pengajar Fisipol UGM.